

# **ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN OPERASIONAL PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

## **ANALISIS OF PREPARATION OF OPERATIONAL REPORTS IN FINANCIAL MANAGEMENT BOARD AND ASSET LUMAJANG**

Oleh :

**Sri Ratna Dwi Lestari, Dr. Arik Susbiyani, M.si, ,Ach. Syahfrudin Z., SE,MM  
1410421052**

Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi  
Universitas Muhammadiyah Jember  
email : [sriratnadwi2@gmail.com](mailto:sriratnadwi2@gmail.com)

### **Abstrak**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang telah sesuai dengan PSAP No. 12 tentang laporan Operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dengan PSAP No. 12. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama dibidang akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang. Data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang berupa Laporan Operasional tahun anggaran 2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif (*Deskriptive Analisis Method*) yaitu suatu metode yang menggambarkan terlebih dahulu mengenai pencatatan, pengakuan serta pelaporan pendapatan dan beban pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang yang kemudian disesuaikan dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang telah sesuai dengan PSAP No. 12. Hal ini dapat dilihat dari pencatatan, pengakuan serta pelaporan pendapatan dan beban yang telah sesuai dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional.

***Kata kunci : Pendapatan-LO, Beban-LO***

### **Abstract**

*The problem in this study is whether the preparation of Consolidated Operations in Financial Management Board and Asset accordance with the PSAP No. 12 Report on Operations. This study aims to determine the suitability of the preparation of Operational Reports in Financial Management Board and Asset Lumajang with PSAP No. 12. The results of this study are expected to provide inputs, especially in the field of public sector accounting related to the Government Accounting Standards Based Accrual.*

*This research was conducted at the Financial Management Board and Asset Lumajang. The data in this research is secondary data. Secondary data were obtained from the Financial Management Board and Asset Lumajang form Activities Report for the fiscal year 2016. The data analysis technique used is descriptive analysis method (Deskriptive Analysis Method) is a method of describing in advance regarding the recording, recognition and reporting revenue and the load on the Financial Management Board and Asset Lumajang which is then adjusted to a PSAP No. 12 Report on Operations.*

*Research result show that the preparation of Consolidated Operations in Financial Management Board and Asset Lumajang accordance with PSAP No. 12. It can be seen from the recording, recognition an reporting of revenues and expenses in accordance with the PSAP No. 12 Report on Operations.*

**Keywords : Revennue-LO, Expenses-LO**

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya diIndonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan padapemerintah daerah. Pengelolaan keuangan dalam praktiknya kini diwarnai dengan adanya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi publik baik dipusat maupun didaerah. Bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Menurut Ratmono (2015). Laporan Operasional yaitu menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas yang dikelola oleh Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Apabila dalam Perat

uran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, kejadian atau transaksi hanya dicatat jika kas telah diterima atau dibayarkan, tetapi pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengharuskan kejadian atau transaksi dicatat pada periode terjadinya. Pencatatan transaksi ini akan diikhtisarkan menjadi sebuah laporan keuangan berupa laporan operasional. Penyusunan laporan operasional ini dilakukan oleh semua SKPD, tidak terkecuali Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 12 tentang Laporan Operasional. PSAP No. 12 menjelaskan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pendapatan-LO dan beban, meliputi definisi, pencatatan, pengakuan dan pelaporan pendapatan-LO dan beban selamaa satu periode pelaporan.

Berdasarkan hasil wawancara di BPKAD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur diketahui terjadi masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Tahun Anggaran 2014. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban penyusutan yang masih ada penyelewengan serta kurang memberikan informasi yang jelas. Pengakuan aset yang berupa 44 bidang tanah senilai Rp. 23,8 miliar bermasalah. Keberadaan aset tersebut tidak didukung bukti kepemilikan yang sah sehingga ada yang diakui sejumlah pihak. Saat ini tanah-tanah tersebut difungsikan untuk membangun gedung sekolah, kantor maupun rumah dinas. Pembangunan gedung pemerintah tersebut menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Akibat belum adanya bukti kepemilikan, keberadaan aset tersebut rawan terhadap penyerobotan dan pengambilalihan oleh pihak lain.

Akibatnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang tidak mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tahun 2014 yang berdampak pada pencatatan laporan operasional. Sehingga Pemerintah Kabupaten Lumajang perlu segera mengatur kebijakan akuntansi, baik kebijakan akuntansi pendapatan maupun kebijakan akuntansi beban atas masalah-

masalah tersebut agar penyusunan Laporan Operasional pada tahun berikutnya dapat disajikan sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 12.

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penyusunan Laporan Operasional pada BPKAD Kabupaten Lumajang ?
2. Apakah penyusunan Laporan Operasional pada BPKAD Kabupaten Lumajang telah sesuai dengan PSAP No. 12 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.
2. Mengetahui kesesuaian penyusunan Laporan Operasional dengan PSAP No.12 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu secara praktis, kebijakan dan teoritis.

##### 1. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi Strata 1 Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Jember, sekaligus menambah pengetahuan akan implementasi teori-teori yang didapat selama perkuliahan.
- b. Bagi Akademis sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dan agar dapat dimanfaatkan sebagai informasi bagi pembaca.

##### 2. Manfaat Kebijakan

Bagi pemerintah dapat digunakan sebagai rujukan khususnya dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

##### 3. Manfaat Teoritis

- a. Bagi pengembangan teori, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terutama dibidang akuntansi sektor publik yang berhubun

gan dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian yang lebih luas dari bahasan ini.

#### 1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup diperlukan untuk memfokuskan penelitian agar lebih terarah. Untuk itu, penelitian ini dibatasi pada penyusunan laporan operasional pada Tahun Anggaran 2016 pada BPKAD Kabupaten Lumajang.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kajian Teoritis

#### 2.1.1 Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan di Indonesia. SAP diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan pada sektor publik. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP yang telah ditempatkan dalam PP No 71 Tahun 2010. (Bastian:2010)

### 2.1.2 Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan serta sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Manajemen
2. Akuntabilitas
3. Transparansi
4. Kestinambungan antargenerasi

### 2.1.3 Persamaan Dasar Akuntansi Pemerintahan

Ratmono (2015:12) meskipun ada dua basis akuntansi yaitu kas (LRA) dan akrual (LO dan Neraca), namun hanya satu persamaan akuntansi yang digunakan. Karena unsur ekuitas terbentuk dari transaksi kas (realisasi anggaran) dan transaksi yang bersifat akrual.

Maka rumus yang adalah :

$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas} + (\text{Pendapatan-LO-Beban})$$

### 2.1.4 Penyajian Laporan Keuangan

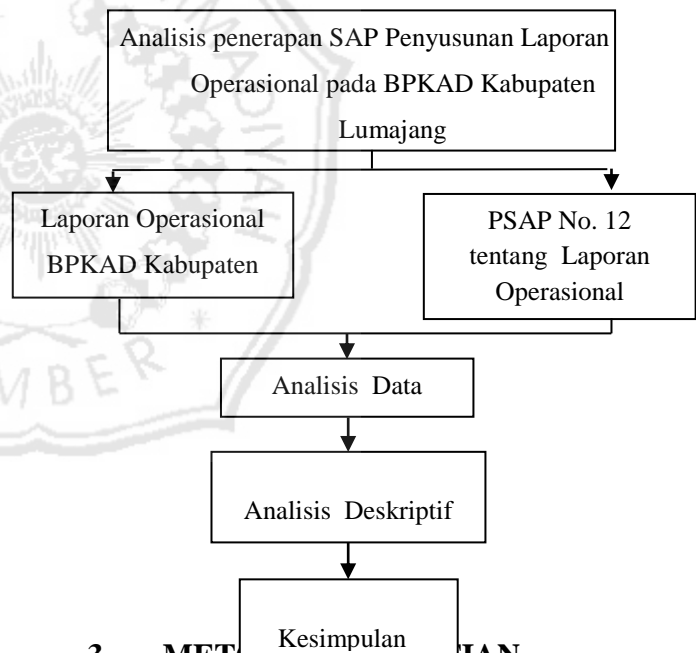
Tujuan pernyataan standar ini adalah untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LRA)
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Perubahan Ekuitas
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

### 2.2 Kerangka Pikir

Gambar 2.1  
Kerangka Pikir



### 3. METODE PENELITIAN

#### 3.1 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Laporan Operasional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2016. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang

beralamat di Jln. Alun-alun Utara No. 7  
Kabupaten Lumajang.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang merupakan data-data yang berupa informasi yang diperoleh melalui wawancara berupa uraian pencatatan, pengakuan dan pelaporan beban badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.
2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung diolah oleh peneliti yakni data-data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian seperti data hasil wawancara dengan Kasubid Penyusunan Program dan Keuangan.
- b. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh setelah diolah oleh orang lain. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional dan struktur organisasi.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini yaitu :

- a. Wawancara dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang terkait dengan akuntansi beban pada BPKAD Lumajang untuk Tahun Anggaran 2016.
- b. Dokumentasi melalui teknik pengumpulan data berupa dokumen organisasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

### 3.4 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini langkah-langkah analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data dan informasi  
Mengumpulkan data dan informasi mengenai gambaran umum Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Lumajang, struktur organisasi dan data terkait laporan operasional.
2. Menelusuri dan mengidentifikasi proses penyusunan, pencatatan, pengakuan dan pelaporan laporan operasional terkait pendapatan dan beban pada Badan Pengelola dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.

3. Membandingkan pencatatan, pengakuan dan pelaporan laporan operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dengan PSAP No 12 yang mengatur.
4. Menganalisis hasil perbandingan pencatatan, pengakuan dan pelaporan laporan operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang dengan PSAP No 12
5. Memberikan kesimpulan atas hasil pembahasan.

#### **4. PEMBAHASAN**

##### **4.1 Profil Kelembagaan**

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang. Dan dijabarkan dalam Pelaksanaan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2014, tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang telah dituangkan dalam rencana kinerja tahunan. Rencana Kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2016 merupakan dokumen

perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun 2016.

#### **Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Lumajang yaitu :**

**Visi :** “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Yang Memenuhi Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah”.

#### **Misi :**

1. Mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan barang/aset daerah
2. Mewujudkan pelayanan dibidang Perbendaharaan dan informasi keuangan barang/aset daerah yang cepat, tepat dan akurat
3. Mewujudkan peningkatan pendapatan

#### **4.2 Hasil Penelitian**

##### **4.2.1 Penyusunan Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Lumajang**

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh BPKAD Kabupaten Lumajang menggunakan sistem komputerisasi dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah

(SIPKD). Sebagaimana program aplikasi komputer yang lain, aplikasi ini memberikan banyak otomatisasi pekerjaan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan BPKAD Kabupaten Lumajang merupakan *output* (keluaran) dari *input* (masukan) berupa bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen seperti Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Buku Kas Umum atau formulir lainnya.

#### 4.2.2 Pencatatan Pendapatan

Berdasarkan dokumen SPJ Penerimaan dan lampirannya, PPK-SKPD mencatat transaksi pendapatan dengan menjurnal “Kas di Bendahara Penerimaan” di Debit dan “Akun Pendapatan Sesuai Jenisnya” di Kredit. Pencatatan pendapatan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

| Tanggal   | Akun  | Uraian Akun                 | Debit          | Kredit         |
|-----------|-------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 01/9/2015 | 1.2.1 | Kas di Bendahara Penerimaan | 48.917.307.155 |                |
|           | 2.1.4 | Pendapatan Pajak Daerah     |                | 48.917.307.155 |

#### 2. Pendapatan Retribusi Daerah

Pencatatan retribusi menggunakan kode JU (Jurnal Umum) pada saat diterbitkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKR), maka

#### 1. Pendapatan Pajak Daerah

Pencatatan pendapatan pajak daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Lumajang menggunakan kode JU (jurnal umum) yaitu ketika diterbitkan Surat Keterangan Pajak Daerah, SKPD telah berhak mengakui pendapatan meski belum diterima pembayaran dari wajib pajak.

Dengan rincian pada tanggal 01/9/2015, BPKAD menerima pembayaran pajak dari entitas yang dibayarkan untuk masa satu tahun kedepan sebesar Rp. 48.917.307.155. Oleh karenanya PPK SKPD mengakui adanya pendapatan pajak LO dengan menjurnal :

SKPD telah berhak mengakui pendapatan meskipun belum diterima pembayaran oleh wajib retribusi (*earned*).

Dengan rincian yaitu pada tanggal 04/2/2016, BPKAD mengeluarkan Surat Keterangan



Retribusi Daerah atas pemakaian kekayaan daerah dan belum diterima pembayarannya dari wajib retribusi sebesar Rp. 10.000.000

Berdasarkan informasi/transaksi tersebut, jurnal yang dicatat oleh PPK-BPKAD Kabupaten Lumajang sehubungan dengan pendapatan retribusi daerah adalah :

| Tanggal   | Akun  | Uraian Akun                    | Debit      | Kredit     |
|-----------|-------|--------------------------------|------------|------------|
| 04/2/2016 | 1.3.1 | Kas di Bendahara<br>Penerimaan | 10.000.000 |            |
|           | 2.1.3 | Pendapatan Retribusi<br>Daerah |            | 10.000.000 |

dari lembaga keuangan sebesar Rp. 2.955.914.935

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Dengan rincian yaitu pada tanggal 01/5/2016, BPKAD mendapatkan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari bagian laba dari pemerintah daerah dan bagian laba

Berdasarkan informasi/transaksi tersebut, maka jurnal yang dicatat oleh PPK-BPKAD Kabupaten Lumajang sehubungan dengan pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah :

| Tanggal   | Akun  | Uraian Akun   | Debit         | Kredit        |
|-----------|-------|---|---------------|---------------|
| 01/5/2016 | 4.1.1 | Kas di Bendahara<br>Penerimaan                          | 2.955.914.935 |               |
|           | 3.2.2 | Hasil Pengelolaan<br>Kekayaan Daerah<br>yang Dipisahkan |               | 2.955.914.935 |

4. Pendapatan Asli Daerah Lainnya Dengan rincian yaitu pada tanggal 04/6/2016, BPKAD

mendapatkan pendapatan asli daerah lainnya yang bersumber dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro,

pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat

Berdasarkan informasi/transaksi tersebut, jurnal yang dicatat oleh PPK-BPKAD Kabupaten Lumajang sehubungan dengan pendapatan Pendapatan Asli Daerah Lainnya adalah :

dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah sebesar Rp. 28.596.109.238

| Tanggal   | Akun  | Uraian Akun                 | Debit          | Kredit         |
|-----------|-------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 04/6/2016 | 1.3.1 | Kas di Bendahara Penerimaan | 28.596.109.238 |                |
|           | 2.1.3 | Lain-Lain PAD yang sah      |                | 28.596.109.238 |

#### 4.2.3 Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang yaitu ketika :

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned* atau
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*)

#### 4.2.4 Pelaporan Pendapatan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang mencatat jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 80.479.331.328 yang terdiri dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp. 48.917.307.155, pendapatan retribusi daerah sebesar Rp. 10.000.000, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 2.995.914.935 dan pendapatan asli daerah lainnya sebesar Rp. 28.596.109.238.

#### 4.2.5 Pencatatan Beban

Pada BPKAD Kabupaten Lumajang hanya memiliki beban pegawai, beban

barang dan jasa, beban penyisihan piutang dan beban penyusutan. Pencatatan keempat beban ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Pencatatan Beban Pegawai

Pencatatan beban pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang menggunakan kode JU (Jurnal Umum). Maka jurnal yang dicatat yang berhubungan dengan beban pegawai pada BPKAD Kabupaten Lumajang adalah :

Pada tanggal 05/8/2016, Bendahara Pengeluaran menerima SP2D atas pembayaran gaji Januari Rp. 142.893.000 berikut rinciannya : Gaji pokok Rp. 120.000.000, Tunjangan Keluarga Rp. 14.000.000, Tunjangan Jabatan Rp. 8.900.000, Tunjangan PPh Rp. 3.760.000, Tunjangan Beras Rp. 9.800.000, Tunjangan PPh Rp. 3.370.000, dengan potongan : Iuran Wajib Pegawai Negeri Rp. 12.862.000, Tabungan Pegawai Rp. 625.000, PPh Pasal 213.450.000.

Maka berdasarkan bukti SP2D tersebut, PPK-BPKAD Kabupaten Lumajang mencatat jurnal sebagai berikut :

| Tanggal   | Akun  | Uraian Akun   | Debit        | Kredit       |
|-----------|-------|---|--------------|--------------|
| 01/1/2016 | 3.1.3 | R/K PPKD  | 142.893.0000 |              |
|           | 1.1.1 | Kas di Bendahara Pengeluaran  |              | 142.893.0000 |
|           | 1.1.1 | Kas di Bendahara Pengeluaran  | 142.893.0000 |              |
|           | 3.1.3 | R/K PPKD (Saat SP2D di SKPD)  |              | 142.893.0000 |
|           | 9.1.1 | Beban Pegawai Kas di Bendahara Pengeluaran (saat dibayarkan kepada pegawai) | 142.893.0000 | 142.893.0000 |

2. Pencatatan Beban Barang dan Jasa

Pencatatan beban barang dan jasa menggunakan kode JU (jurnal umum) pada saat pembelian barang dan jasa yaitu ATK. Sedangkan penyesuaian berhubungan dengan beban barang dan jasa pada akhir periode akan terisi secara otomatis.

Sebagai jurnal yang dicatat oleh PPK-BPKAD Kabupaten

| Tanggal    | Akun  | Uraian Akun           | Debit          | Kredit         |
|------------|-------|-----------------------|----------------|----------------|
| 31/12/2016 | 9.1.2 | Beban barang dan Jasa | 12.607.549.030 |                |
|            | 1.1.2 | Persediaan            |                | 12.607.549.030 |

Lumajang berhubungan dengan beban barang dan jasa yaitu : Tanggal 31/12/2016, total pemakaian barang dan jasa senilai Rp. 12.607.549.030. Berdasarkan *stock opname*, maka jurnal yang dicatat yaitu :

### 3. Pencatatan Beban Penyusutan

Aset tetap yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Lumajang berupa peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan serta aset tetap lainnya. Perhitungan beban penyusutan pada BPKAD Kabupaten Lumajang menggunakan metode garis lurus. Penyusutan dilakukan berdasarkan harga perolehan tahun 2016.

Penetapan umur manfaat aset tetap pada BPKAD Kabupaten Lumajang yaitu :

- Peralatan dan mesin dengan umur ekonomis 5 tahun.
- Gedung dan bangunan dengan umur ekonomis 20 tahun.
- Jalan, irigasi dan jaringan dengan umur ekonomis 10 tahun.
- Aset tetap lainnya dengan umur ekonomis 5 tahun.

Jurnal yang dicatat oleh PPK-BPKAD Kabupaten Lumajang yang berhubungan dengan aset tetap yaitu :

| Tanggal    | Akun  | Uraian Akun          | Debit          | Kredit         |
|------------|-------|----------------------|----------------|----------------|
| 31/12/2016 | 9.1.7 | Beban Penyusutan     | 1.5581.430.644 |                |
|            |       | Aset Tetap Akumulasi |                |                |
|            | 1.3.7 | Penyusutan           |                | 1.5581.430.644 |

4. Pencatatan beban penyisihan piutang

Jurnal yang dicatat oleh PPK-BPKAD Kabupaten Lumajang yaitu :

| Tanggal    | Akun  | Uraian Akun              | Debit       | Kredit      |
|------------|-------|--------------------------|-------------|-------------|
| 31/12/2016 | 5.1.8 | Beban Penyisihan Piutang | 123.689.325 |             |
|            | 1.3.8 | Penyisihan Piutang       |             | 123.689.325 |

#### 4.2.6 Pengakuan Beban

Pengakuan beban pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang yaitu penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang berupa pengeluaran atau timbulnya kewajiban atau konsumsi aset. Beban BPKAD Kabupaten Lumajang yaitu :

1. Beban pegawai, merupakan beban yang berhubungan dengan pegawai yang ada di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Lumajang yang berupa gaji serta tunjangan, honor serta tunjangan lainnya.
2. Beban barang dan jasa yaitu beban yang berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa antara lain ATK, pembayaran listrik, air dan telepon.
3. Beban penyusutan yaitu penurunan manfaat ekonomi atas aset tetap yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Lumajang.

4. Beban penyisihan piutang, merupakan beban yang berhubungan dengan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari entitas lain setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

#### 4.2.7 Pelaporan Beban

BPKAD Kabupaten Lumajang mencatat jumlah beban sebesar Rp. 39.898.273.717 yang terdiri dari beban pegawai-LO sebesar Rp. 25.585.604.718, beban barang dan jasa sebesar Rp. 12.607.549.030, beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp. 1.581.430.644 dan beban penyisihan piutang sebesar Rp. 123.689.325. Jumlah defisit dari operasi pada BPKAD Kabupaten Lumajang yang berakhir 31 Desember 2016 yaitu Rp. 40.581.057.610

### 5. KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Lumajang untuk tahun anggaran 2016 telah sesuai dengan PSAP Nomor 12 yaitu tentang Laporan Operasional. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Operasional pada BPKAD Kabupaten Lumajang adalah :

- a. Langkah pertama yaitu mencatat jurnal
- b. Langkah selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setelah mencatat jurnal adalah melakukan posting ke buku besar masing-masing perkiraan
- c. Pada akhir periode akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyusun neraca saldo
- d. Setelah neraca saldo, tahapan selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang adalah melakukan penyesuaian terhadap perkiraan-perkiraan tertentu dengan membuat jurnal penyesuaian
- e. Setelah jurnal penyesuaian dibuat, Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya mempostingnya keperkiraan buku besar yang berhubungan.

Setelah melakukan posting, selanjutnya menyusun neraca saldo setelah penyesuaian

- f. Setelah neraca saldo setelah penyelesaian, maka langkah selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan SKPD. Laporan keuangan yang dihasilkan salah satunya yaitu Laporan Operasional

2. Pencatatan, pengakuan dan pengukuran Laporan Operasional pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang :

- a. Pencatatan beban dan pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang  
Pencatatan beban dan pendapatan pada BPKAD Kabupaten Lumajang menggunakan kode JU (Jurnal Umum). Pencatatan jurnal dilakukan dengan memasukkan kode akun yang akan di "Debet" dan di "Kredit", maka nama akun yang bersangkutan akan muncul secara otomatis. Pada tahun anggaran

2016 PPK-SKPD mencatat jumlah beban yang ditanggung sebesar Rp. 39.898.273.717.

Sedangkan Berdasarkan dokumen SPJ Penerimaan dan lampirannya, PPK-SKPD Kabupaten Lumajang mencatat transaksi pendapatan dengan menjurnal “Kas di Benda hara Penerimaan” di Debit dan “Akun Pendapatan Sesuai Jenisnya” di Kredit. Pada tahun anggaran 2016 PPK-SKPD mencatat jumlah pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 80.479.331.328

b. Pengakuan beban dan pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang :

- Beban pegawai diakui ketika adanya kewajiban untuk melakukan pembayaran gaji kepada pegawai. Pada akhir periode kas yang telah dibayarkan kepada pegawai akan dianggap sebagai beban pegawai.
- Beban barang dan jasa diakui pada saat terjadinya pemakaian barang

dan jasa. Pada akhir periode, barang/jasa yang telah di konsumsi akan dianggap sebagai beban pada periode bersangkutan.

- Pengakuan beban juga dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Lumajang apabila terjadi penurunan ekonomi atas aset tetap yang dimiliki.
- Selain itu, pengakuan beban penyisihan piutang diakui ketika saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Pada akhir periode, penyisihan piutang dapat dianggap beban penyisihan piutang apabila ada surat ketetapan
- Sedangkan pendapatan diakui dengan asas bruto, yaitu segala biaya yang langsung mengurangi jumlah yang diterima tidak menjadi pengurang dalam melakukan pencatatan biaya tersebut akan dicatat sebagai belanja di

tahun anggaran yang sama.

- c. Pelaporan beban dan pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lumajang. BPKAD Kabupaten Lumajang pada tahun anggaran 2016 melaporkan beban yang ditanggung sebesar Rp. 39.898.273.717 dan pendapatan sebesar Rp. 80.479.331.328

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang diberikan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

- Untuk BPKAD Kabupaten Lumajang untuk lebih meningkatkan kebijakan-kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang dihasilkan serta dapat menyajikan Laporan Keuangan tepat waktu.
- BPKAD Kabupaten Lumajang sebaiknya memberi bimbingan dan pelatihan yang berhubungan dengan PSAP Nomor 12.
- Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat memasukkan kota/kabupaten lain sebagai pembandingan dalam menganalisis kesesuaian penyusunan Laporan

Operasional sehingga dapat dijadikan landasan untuk menggali penerapan PSAP Nomor 12 pada pemerintah daerah di Indonesia.

## REFERENSI

- Achmad Fauzi. 2012. Akuntansi Pemerintah. Jakarta. IN Media
- Agoes, Sukrisno. 2013. Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik). Jakarta. Salemba Empat
- Ardiyos. 1996. Kamus Produksi dan Manajemen. Jakarta. Citra Harta Prima
- Arif, Bahtiar. dkk. 2002. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta. Salemba Empat
- Arikunto, Suharsimi. 1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta. Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Erlangga.
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Jakarta. Erlangga
- Bungin, Burhan. 2008. Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta. Kencana.
- Chabib Soleh Dan Heru Rochmansyah. (2010). Pengelolaan Keuanagan dan Aset Daerah. Bandung. Fokusmedia.
- Dunia Firdaus A. 2010. Ikhtisar Lengkap Pengantar Akuntansi Edisi Ketiga. Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- E. Kieso, Donald, Jerry J, Weygendt and Teery D. Warfield, 2009. *Accounting*



*Principles*, Edisi 12 by. Salemba  
Empat

Erlina, Rasdianto. 2013. Akuntansi  
Keuangan Daerah Berbasis Akrua.  
Medan. Aksara

